



### AKSI SIMPATIK MENOLAK PERNIKAHAN DINI

Mahasiswa Politeknik Akbara Solo melakukan aksi simpatik dengan membentangkan poster Menolak Menikah Muda di Solo, Jawa Tengah, Jumat (12/5). Aksi tersebut sebagai bentuk keprihatinan atas tingginya angka pernikahan dini di Indonesia yang tercatat meningkat dalam tiga tahun terakhir.

## Arab Saudi Tertarik Ekspor Ikan Hias, Peluang Usaha bagi Warga Tangerang

Potensi ini juga membuka peluang bagi para pembudidaya ikan hias di Tangerang. Selain itu, juga dapat melebar ke sektor industri pakan ikan hias di Tangerang yang akan semakin maju. Seperti salah satunya adalah budidaya maggot di Perumahan Benua Indah, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebagai salah satu penyedia pakan hewan peliharaan ikan hias.

**TANGERANG (IM)**- Peluang usaha ikan hias tengah terbuka lebar bagi para pembudidaya. Peralannya, masyarakat Arab Saudi diketahui tengah gemar memelihara hewan tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Atase Perdagangan KBRI Riyadh Gunawan, yang menyebut potensi para pelaku usaha berniat mengimpor ikan hias dari Indonesia. "Pelaku usaha Arab Saudi

akan meningkatkan transaksi pembelian ikan hias dari Indonesia. Ini peluang sangat besar bagi pelaku usaha ikan hias di tanah air," kata Gunawan Jumat (12/5).

Gunawan mengatakan, ekspor hewan peliharaan yang termasuk dalam kategori tidak terlarang sudah seharusnya tersingkatkan. Terlebih, Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan wilayah perairan.

"Potensi ekspor hewan peliharaan termasuk ikan hias air tawar sangat besar mengingat Indonesia sebagai negara tropis dan sebagian besar wilayahnya perairan. Indonesia mempunyai sumber daya hewan peliharaan yang sangat bervariasi dan dalam

jumlah yang besar," jelasnya. Menurutnya, budidaya ikan hias air tawar akan memberikan efek ekonomi domino yang melibatkan banyak peternak dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Untuk itu, pemerintah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta asosiasi perlu meningkatkan kompetensi para peternak dan kapasitas produksi budidaya ikan hias air tawar melalui skema integrasi dengan agregator yang dapat mendorong peningkatan ekspor bagi pelaku UMKM," tuturnya.

Potensi ini juga membuka peluang bagi para pembudidaya ikan hias di Tangerang. Selain itu, juga dapat melebar

ke sektor industri pakan ikan hias di Tangerang yang akan semakin maju.

Seperti salah satunya adalah budidaya maggot di Perumahan Benua Indah, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, sebagai salah satu penyedia pakan hewan peliharaan ikan hias.

Aktivis Benua Lestari Indonesia Kota Tangerang, Eko Fauzan menyampaikan, maggot dapat menjadi alternatif pakan ikan hias yang lebih baik lantaran memiliki kandungan protein tinggi.

"Pakan ikan biasanya, kan, pakai pelet. Nah, pakai fresmaggot juga bisa. Selain lebih mahal 30-40 persen dari pelet, protein fresmaggot lebih tinggi," katanya. ● pp

## Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten

**SERANG (IM)**- Masa jabatan Al Muktabar sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten diperpanjang oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu tertuang melalui Keputusan Presiden No. 39/P Tahun 2023 tentang perpanjangan masa jabatan, pemberhentian dan Pengangkatan penjabat Gubernur, yang ditetapkan 11 Mei 2023.

Keputusan ini pun diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian kepada Al Muktabar pada Jumat (12/5) di gedung Kemendagri RI di Jakarta Pusat. "Saya menerima perpanjangan keputusan presiden tentang jabatan (penjabat) gubernur Banten," kata Al Muktabar kepada wartawan usai menerima surat keputusan, Jumat.

Dikatakan Al Muktabar, Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Mendagri mengamanatkan kepadanya agar menjalankan tugas

sebaik-baiknya memimpin Banten. Amanat itu pun diakui akan dijalankannya dengan bimbingan dan arahan Mendagri. "Semua yang telah kita lakukan terus ditingkatkan dan harapannya terus harus semakin baik, dan menyatakan siap melaksanakan tugas-tugas itu," ujar dia.

Mantan Sekda Banten itu pun menyampaikan ucapan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah mempercayai pucuk pimpinan di tanah para jawara kepadanya untuk kedua kalinya. Adapun pekerjaan rumah yang harus diperbaiki seperti reformasi birokrasi, penganggaran, stunting, kemiskinan dan yang lainnya. "Ini amanah, kepercayaan harus dijunjung tinggi dan tentu atas amanah dan tugas itu kita akan melaksanakan dengan berupaya semaksimal mungkin ada batas kemampuan yang kita punya dan kewenangan yang ada," kata Al. ● pra

## Wali Kota Cilegon Dorong Optimalisasi Penggunaan KKPD

**CILEGON (IM)**- Pemerintah Kota Cilegon menjadi kota madya pertama yang menerapkan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Implementasi ini juga mendorong Cilegon berpotensi menjadi daerah percontohan atau pilot project bagi kabupaten/kota lain di Indonesia. Adapun penerapan KKPD ini bertujuan untuk mewujudkan digitalisasi dan elektronifikasi sistem pembayaran pemerintah dan Belanja Daerah (APBD). "Pada kesempatan yang baik ini, saya (Hellyd Agustian-red) selaku Wali Kota Cilegon mendukung optimalisasi penggunaan KKPD," kata Wali Kota Cilegon, Hellyd Agustian dalam keterangan tertulis, Jumat (12/5).

Hal ini dikatakannya saat menyampaikan testimoni secara virtual pada Peluncuran Kartu Kredit Indonesia yang dirangkaikan dengan Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Senin (8/5). Hellyd pun berharap pihaknya dapat mendorong percepatan implementasi KKPD guna mewujudkan modernisasi sistem pembayaran pemerintah dan mendukung penggunaan produk dalam negeri. "Kami berharap, implementasi KKPD ini dapat mewujudkan modernisasi sistem pembayaran pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksana menjelaskan Pemkot Cilegon saat ini telah menerapkan sistem KKPD. Hal itu sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri untuk mewujudkan digitalisasi dan elektronifikasi sistem pembayaran belanja APBD Kota Cilegon. "Semua pemerintah daerah diarahkan untuk menerapkan sistem KKPD oleh Kemendagri. Kota Cilegon merupakan daerah pertama yang sudah melaksanakan KKPD sejak April 2023," paparnya.

Dalam upaya implementasi KKPD, Dana mengaku pihaknya secara intensif berkomunikasi dan meminta bimbingan dari Kemendagri dan Bank Jawa Barat-Banten (BJB). "Kami minta bimbingan dari Kemendagri dan Bank BJB. Saat ini, sudah ada 5 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sudah efektif menerapkan KKPD dalam bertransaksi di antaranya BPKPAD, Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Setda (Sekretariat Daerah), Dindik (Dinas Pendidikan) dan DPAD (Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah). Dalam penerapan KKPD ini, Pemkot Cilegon sudah memiliki Perwal (Peraturan Wali Kota) sebagai acuan hukum," jelasnya. ● pra

## Pemkot Tangsel Punya PR 51 Rekomendasi Temuan BPK

**SERANG (IM)**- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten mencatat bahwa sejak 2010 sampai 2022 terdapat 716 rekomendasi temuan BPK pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) Dan 716 rekomendasi, Pemkot Tangsel baru menindaklanjuti 614 rekomendasi. Artinya Pemkot Tangsel baru menyelesaikan 85,75% dari keseluruhan rekomendasi periode 2010-2022. Dengan begitu, Pemkot Tangsel masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) berupa 51 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Banten, Emmy Mutiarini. Pada LKPD 2022, BPK sendiri mencatat terdapat beberapa temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemkot Tangsel. "Kiranya masih ada 51 rekomendasi atau sekitar 14,25% yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Tangsel," kata Emmy usai memberikan opini WTP kepada Pemkot Tangsel di Kantor BPK Perwakilan Banten, Kota Serang, Jumat (12/5).

Atas hal tersebut, Emmy berharap Pimpinan DPRD Tangsel dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya. "Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD," ungkapnya. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Banten memberikan opini wilayah tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) atas LKPD tahun 2022. Namun, dalam opini ini, BPK juga memberikan catatan khusus atas beberapa temuan BPK kepada Pemkot Tangsel.

Kepala Perwakilan BPK Banten, Emmy Mutiarini mengatakan, BPK menekankan pada catatan 5.5.2.5 Kewajiban Jangka Pendek atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menjelaskan Utang Barang Jasa-Utang Jasa Pelayanan E-KTP.

Utang Jasa Pelayanan E-KTP ini merupakan utang yang timbul dari jasa pelayanan kesehatan untuk tenaga medis dan tenaga pendukung yang belum dibayarkan sebagai dampak Program Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Kota Tangerang Selatan. Program ini mengamanatkan RSUD Kota Tangerang untuk melayani pasien masyarakat dengan KTP Kota Tangerang Selatan secara bebas biaya/gratis.

"Pada tahun 2021 dan tahun 2022 RSUD Kota Tangerang Selatan tidak menganggarkan pembayaran utang jasa pelayanan kesehatan karena kemampuan keuangan RSUD diprioritaskan untuk pembayaran obat-obatan dan lain-lain yang urgent," kata Emmy.

Kata Emmy, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkomitmen akan

menganggarkan pembayaran utang jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga medis dan tenaga pendukung tersebut pada APBD Perubahan Tahun 2023.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah memperoleh opini WTP 7 kali. Pada Tahun 2023 ini memperoleh WTP dengan Penekanan Suatu Hal. Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kota Tangerang Selatan, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Adapun permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain: Pajak Daerah atas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum ditetapkan;

Pengelolaan Aset Tetap belum memadai antara lain Pengembangan Perumahan belum menyerahkan sertifikat tanah PSU yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 dan 2022. "Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi

LHP dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima," pungkasnya. ● pra

## Ketua DPRD Banten Mengelak Soal Pengadaan Pajero Ambulans

**SERANG (IM)**- Pembelian ambulans jenis Pajero sport Setwan DPRD Banten terus menjadi perhatian publik. Saat dikonfirmasi Ketua DPRD Banten, Andra Soni menyarankan agar mengonfirmasi kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Banten. "Ke Sekwan saja ya kalau itu, karena itu kan kegiatan dari sekretariat ya," kata Andra.

Andra sama sekali enggan berkomentar terkait pembelian ambulans mewah tersebut. Namun dia menyebut sebelum pembelian mobil tersebut, Sekretaris DPRD Banten sudah memiliki ambulans. "Memang sebelumnya ada ambulans di sana, tapi lebih detailnya ke Sekwan," ujar dia.

Bahkan Andra mengaku tidak mengetahui harga ambulans yang dibeli untuk memfasilitasi anggota DPRD Banten tersebut. "Saya belum cek, ke sekretariat saja," tutup dia.

Untuk diketahui pembelian ambulans tersebut bersumber dari APBD 2023, yang mencapai angka kisaran Rp1 miliar.

Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Banten, Deden Apriandi mengatakan, pembelian mobil ambulans tersebut dilakukan karena ada sudah tidak bisa dipakai lagi.

"Latar belakang kita membeli ambulans di tahun anggaran 2023 ini, karena memang mobil ambulans yang ada di kita sudah tidak bisa dipakai, bukan tidak laik lagi yah tapi memang sudah tidak bisa dipakai," kata Deden, Kamis (11/5).

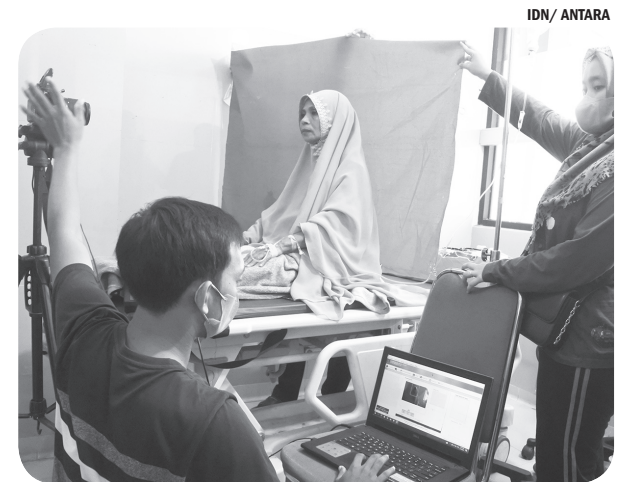
Selain itu pembelian mobil ambulans tersebut dilakukan karena intensitas pekerja di lingkungan DPRD Banten cukup tinggi, dan tidak jarang didapati pegawai dan anggota dewan yang tiba-tiba sakit.

"Selangun intensitas para pekerja di sini termasuk juga anggota DPRD cukup tinggi, tidak jarang kita mendapati pegawai yang tiba-tiba sakit, atau kemudian para anggota dewan juga ada beberapa yang pada sakit," jelasnya.

Selain itu, seringnya terjadi kecelakaan di depan Gedung DPRD Banten dan tidak bisa dilakukan evakuasi sesuai dengan standar kesehatan.

"Bahkan ada beberapa kecelakaan di wilayah kita juga di depan sini juga kecepatan mobil tinggi-tinggi jadi ada beberapa kali kita mengalami kejadian kecelakaan di wilayah kita. Nah pada saat kejadian itu terjadi agak sulit kita melakukan evakuasi sesuai dengan standar kesehatan, karena memang kita tidak punya mobil ambulans yang bisa jalan," dalih Deden.

Deden mengungkapkan mobil ambulans tersebut sebenarnya menjadi perlengkapan ruang klinik yang sudah ada di DPRD Banten. "Sebetulnya mobil ambulans ini melengkapi ruang klinik yang sudah ada, kita juga sudah punya kliniknya, kita sudah punya dokter jaganya, kita juga sudah punya perawat, jadi ini hanya pelengkap sebetulnya. Pelengkap dari fungsi pelayanan kesehatan yang ada di sekitar DPRD," bebarnya. ● pra



### PEREKAMAN DATA KTP ELEKTRONIK PASIEN RUMAH SAKIT

Seorang pasien mengikuti proses perekaman data KTP elektronik di RSUD Besuki, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (12/5). Perekaman data tersebut dilakukan karena pasien tidak mempunyai data kependudukan atau KTP sebagai syarat mendapatkan pelayanan kesehatan dalam program Sehati (Situbondo Sehat Gratis) yaitu biaya perawatan gratis sebesar Rp10 juta per orang.

## Kendalikan Harga, Pemkab Lebak Segera Gelar Operasi Pasar

**LEBAK (IM)** - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, segera menggelar operasi pasar (OP) untuk mengendalikan harga bahan pokok menyusul kenaikan harga di pasaran.

"Kami berharap dengan OP bahan pokok ini, harga bisa kembali stabil dan daya beli masyarakat meningkat," kata Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Dedi Setiawan dalam keterangannya di Lebak, Banten, kemarin.

Pelaksanaan OP bahan pokok dilakukan setelah rapat yang melibatkan Pemprov Banten juga Tim Penanggulangan Inflasi Daerah (TIPID), Satgas Pangan, dan Perum Bulog. Saat ini, harga komoditas bahan pokok terjadi kenaikan terutama beras, telur, minyak goreng, dan gula pasir.

Harga beras di 11 pasar tradisional di Kabupaten Lebak, di antaranya Pasar Rangkasbitung, Maja, Cipanas, Sampay, Muncang, Wanasalam, dan Bayah rata-rata naik Rp1.000/kg. Untuk beras medium jenis KW 1 semula dijual Rp10.200 kini Rp11.200/kg, beras KW II dari Rp9.200 menjadi Rp10.200/kg dan beras medium KW III dijual Rp9.200 dari sebelumnya Rp8.200/kg.

Sedangkan, harga minyak goreng curah juga terjadi kenaikan dari semula Rp14.000 menjadi Rp15.000/liter dan minyak kemasan dari Rp17.000 menjadi Rp18.500/liter. Lalu, harga gula putih naik dari Rp10.500 menjadi Rp13.000/kg, telur semula Rp24.000 menjadi Rp28.000/kg dan daging sapi/kerbau Rp110.000/kg.

"Kami meyakini OP salah satu upaya untuk menstabilkan harga di pasaran agar daya beli masyarakat meningkat," katanya. Ia mengatakan selama ini pendistribusian kebutuhan bahan pokok masih aman sesuai hasil pemantauan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Lebak selama Ramadhan 2023 melaksanakan OP di berbagai kecamatan untuk menstabilkan harga bahan pokok.

Selain itu, juga pihaknya mengoptimalkan pasar murah di 28 kecamatan, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa mencukupi kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau dibandingkan harga pasaran. "Kami menjamin pasokan bahan kebutuhan pokok cukup dan harga relatif stabil," katanya.

Ia juga mengatakan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum akan mengawasi spekulasi maupun distributor bahan pokok guna mencegah terjadi penimbunan barang. Selama ini, pihaknya tidak menemukan adanya penimbunan bahan pokok, sehingga persediaan aman dan mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Namun, pihaknya akan mengambil tindakan tegas jika harga kebutuhan bahan pokok itu melonjak tinggi, karena pasokan cukup melimpah. Di samping itu, pendistribusian kebutuhan bahan pokok di Kabupaten Lebak juga berjalan lancar hingga ke 28 kecamatan. "Kami menjamin stok bahan pokok cukup untuk konsumsi masyarakat," ujarnya. ● pra



### REKAYASA JADWAL TRASPORTASI ANTARPULAU DI TERNATE

Kondisi demaga penghubung kendaraan yang ambruk di Dermaga 1 Pelabuhan Ferry Bastiong, Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (12/5). PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate memberlakukan rekayasa jadwal transportasi penyeberangan antarpulau menggunakan kapal ferry sementara waktu akibat ambruknya salah satu demaga yang ditabrak oleh KMP Mutiara Pertiwi 1 pada 10 Mei lalu.